

PERAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SUKASARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Nia Triani¹, Regi Refian Garis², Asep Nurdin Rosihan Anwar³,
Rifki Agung Kusuma Putra⁴, Dede Syahril Sidik⁵

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail: rissadwimeilani_9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang menunjukkan Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum berperan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Kepala Desa belum berperan optimal dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sesuai dengan peran Kepala Desa menurut Siagian (2012:142). Hal ini dikarenakan kepala desa kesulitan dalam melaksanakan perannya dalam melakukan penanggulangan covid-19 di masyarakat karena kurangnya dukungan peraturan yang konsisten sehingga dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan oleh pemerintah desa, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti arahan dan sosialisasi sehingga masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan prokes. Permasalahan lainnya disebabkan oleh kurangnya dukungan yang diberikan kepada kepala desa baik dari satgas covid-19 maupun masyarakat dalam memberikan berbagai masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat suatu kebijakan untuk penanggulangan covid-19. Oleh Karena itu maka Kepala Desa telah melakukan upaya dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan covid-19 di masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kecamatan untuk dapat memahami aturan kebijakan dalam penanganan covid-19 di masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Penanggulangan Covid-19

ABSTRACT

This research is motivated by a problem which shows that the village head in the handling of Covid-19 in Sukasari Village, Banjarsari District, Ciamis Regency has not played an optimal role. The purpose of this study is as follows to find out the role of the village head in handling Covid-19 in Sukasari Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The method used in this research is descriptive analysis. Informants as many as 8 people. Data collection techniques are library research, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through data processing from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer problems in research. Based on the research results it is known that: The village head has not played an optimal role in the handling of Covid-19 in Sukasari Village, Banjarsari District, Ciamis Regency according to the role of the Village Head according to Siagian (2012: 142). This is because the village head has difficulty carrying out his role in carrying out Covid-19 countermeasures in the community due to a lack of consistent regulatory support so that it is used as the basis for implementing policies by the village

government, besides that there is a lack of public awareness in following directions and outreach so that there are still people who do not implement prokes. Another problem is caused by the lack of support given to village heads from both the Covid-19 task force and the community in providing various inputs that can be used as a basis for making a policy for handling Covid-19. Because of this, the village head has made efforts to implement the Covid-19 countermeasures policy in the community which is carried out through activities to increase coordination with the regional and sub-district governments to be able to understand the policy rules in handling Covid-19 in the community.

Keywords: *Role, Village Head, Covid-19 Countermeasures*

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran *Covid-19* melihat desa merupakan salah satu yang harus diperhatikan juga karena di Negara Indonesia tidak hanya meliputi Kota saja namun banyak daerah Pedesaan atau Desa. Salah satu regulasi yang di buat pemerintah pusat adalah melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi, SEMendes Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19*, dimana disebutkan dalam surat edaran point F yaitu: Desa Tanggap COVID-19 membentuk relawan Desa lawan Covid-19. Tugas relawan adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, memaknai informasi terkait Covid-19, termasuk gejala, cara penularan dan tindakan pencegahan, serta mendata kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis. Penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya, fasilitas Desa yang teridentifikasi yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi, dan pembentukan relawan Desa sebagai bentuk implementasi Desa tanggap Covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pemerintah Desa ialah ujung tombak pemerintahan, merupakan gabungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah Pusat tidak akan bertindak sendiri dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di mana Pemerintah Pusat juga memberi tugas wewenang salah satunya kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi

permasalahan virus Covid-19 Dalam hal ini Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengendalikan dan melindungi wilayahnya, dengan dorongan dana dan kewenangan otonomi asli desa membuat Pemerintah Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan penanganan virus corona. Sejauh ini popularitas Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang telah meninggal dan ribuan orang telah terinfeksi. Karena itu, pemerintah pusat banyak merumuskan regulasi mencegah penyebaran dan mengurangi penyebaran dengan keluarnya Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan Surat Edaran Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap

Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia sudah berupaya meningkatkan kewaspadaan paling utama dalam perihal penindakan serta penangkalan penyebaran virus Corona, dengan menerbitkan protokol kesehatan untuk penindakan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Protokol tersebut tidak cuma berisi panduan bagaimana penindakan pengidap yang sudah terinfeksi Covid-19, serta menjauhi penularan secara langsung dan di tempat umum. Pandemi Covid-19 juga telah memberikan dampak padaperekonomian di Desa. oleh karena itu dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa, maka sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat karena sekuat apapun kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah atau Pemerintah Desa kalau tidak didukung oleh masyarakat akan berdampak sia-sia, karena itu dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat, mulai dari pemerintah desa, lembaga-lembaga Desa, pendamping desa, tenaga medis, dan tokoh masyarakat. Kegiatan pencegahan yang dilaksanakan berupa edukasi melalui sosialisasi yang tepat terkait Covid-19, pendataan penduduk rentan sakit, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, penyediaan informasi penting terkait Covid-19, melaksanakan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan cara pemantauan pergerakan masyarakat Desa, pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, serta pemantauan perkembangan orang dalam pantauan Covid-19, dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan banyak orang.

Karakteristik Desa yang berbeda-beda, maka penanggulangan wabah Covid-19 di masing-masing desa memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai, adat istiadat, dan kebiasaan dari masyarakat.

Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 merupakan sebuah arahan terkait kegiatan yang harus dilakukan Desa dalam penanggulangan Wabah Covid-19, namun pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada desa, termasuk jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di Desa. Oleh karena itu, penanggulangan wabah Covid-19 harus dilakukan mulai dari tingkat terendah, yaitu pada tingkat Desa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat penanggulangan wabah Covid-19 di tingkat Desa. Desa Tanggap Covid-19 tidak akan terwujud jika tidak ada kerja sama semua pihak di tingkat Desa. Oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin, yang dalam hal ini Kepala Desa yang mampu bekerja sama dengan semua unsur dalam penanggulangan Covid-19.

Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Desa yang terkena dampak covid-19 hal ini ditandai dengan adanya masyarakat yang positif covid-19 oleh karena itu pemerintah desa secara cepat tanggap melakukan berbagai penanggulangan. Namun demikian penanggulangan Covid-19 dirasa belum optimal karena terkendala oleh berbagai faktor sehingga terkesan lambat.

Begitupula dengan hasil pengamatan awal penulis, terlihat bahwa Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum berperan secara optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurang berperannya Kepala Desa selaku stabilisator dalam melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam melakukan pencegahan covid-19 hal tersebut dibuktikan dengan lambatnya pembentukan tim relewan covid-19 sehingga masih belum optimal dalam memutus penyebaran covid-19 .

2. Kurang berperannya Kepala Desa selaku pelopor dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai kegiatan preventif dan kuratif dalam melakukan pencegahan covid-19 sehingga langkah antisifatif yang dilakukan oleh Kepala Desa belum optimal dalam memutus penyebaran covid-19.
3. Kurang berperannya Kepala Desa sebagai modernisator dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melakukan pencegahan covid-19 sehingga masyarakat belum bisa memahami terhadap bahaya covid-19. Contohnya kurangnya dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya covid-19.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : **"Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis"**.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ?

KAJIAN PUSTAKA

Usaha serius pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 bukan hanya pada tataran pemerintah pusat, tapi juga sampai pada tingkat Desa. Sebagai bentuk upaya mitigasi Covid-19 di tingkat desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Desa tanggap Covid-19 dimaksudkan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Desa, sedangkan program Padat Karya Tunai Desa dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi desa di masa pandemi.

Desa Tanggap Covid-19 tidak akan terwujud jika tidak ada kerja sama semua pihak di tingkat Desa. Oleh karena itu dibutuhkan sosok pemimpin, yang dalam hal ini Kepala Desa yang mampu bekerja sama dengan semua unsur dalam penanggulangan Covid-19, sehingga kajian tentang bagaimana Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sangat lah penting dilakukan.

Menurut Siagian (2012:142), menyatakan bahwa peran pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Peran Selaku Stabilisator

Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan bernegara berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran stabilisator (Stabilisator di bidang politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial).

2. Peran selaku Inovator,

Salah satu produk dari kreativitas yang ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berfikir baru. Dengan demikian dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya akan melincahkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan, inovasi yang bersifat konsepsional dan inovasi sistem prosedur dan metode kerja.

3. Peran selaku modernisator,

Pemerintah yang bertugas menggiring masyarakat kearah kehidupan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional, kesediaan mengambil risiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan.

4. Peran selaku pelopor,

Dengan perkataan lain selaku pelopor, aparat pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat misalnya kepeloporan dalam bekerja, kepeloporan dalam kejujuran, peloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan, kepeloporan kesediaan berkorban, kepeloporan dalam keperdulian terhadap lingkungan pelestarian lingkungan, kepeloporan dalam penerapan objektivitas, kepeloporan dalam meningkatkan efisiensi serta kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan

5. Peran selaku pelaksana sendiri,

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Dengan demikian untuk melakukan pencegahan covid-19 di desa maka peran kepala desa sangat penting sehingga dalam melaksanakan perannya perlu melibatkan semua unsur untuk bersama-sama menanggulangi wabah Covid-19.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sesuai dengan pendapat Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu : “Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaku Stabilisator

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Kepala Desa selaku stabilisator dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan ketiga indikator penelitian ternyata belum optimal hal ini dikarenakan kepala desa sebagai pemimpin belum berperan dalam menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat

Menurut Hendrik (2013:119) menyatakan bahwa :

Salah satu peran yang penting yang harus dimainkan oleh pimpinan secara efektif adalah sebagai stabilisator yaitu menciptakan suasana yang stabil dibidang politik, ekonomi, sosial budaya sehingga setiap pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan lancar tanpa adanya hambatan yang bersifat menghancurkan karena menjalankan sebuah

Desa yang dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan Kepala Desa yang bisa mengatur atau mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian peran Kepala Desa dalam menanggulangi covid-19 belum berperan dalam menciptakan stabilitas politik, ekonomi dan sosial sehingga masyarakat yang terdampak belum dapat terpenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama yang terjalin dalam melakukan penanggulangan covid-19 sehingga kepala desa kesulitan dalam memperoleh dukungan dalam melaksanakan kebijakannya. Dalam aspek ekonomi kepala desa kesulitan dalam membantu semua warga masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19 karena adanya aturan-aturan yang menyebabkan tidak dapat membantu semua masyarakat memperoleh BLT DD. Selain itu masih kurangnya kepala desa dalam menciptakan stabilitas sosial melalui berbagai kegiatan untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang pandemi covid-19 sehingga masyarakat kurang merasa tenang dan khawatir dengan penyebaran covid-19.

Selaku Inovator

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Kepala Desa selaku innovator dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan ketiga indikator penelitian ternyata belum optimal hal ini diketahui dari Kepala Desa dalam membentuk kampung tangguh sebagai kegiatan penanggulangan covid-19 kurang memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini disebabkan pembentukan kampung tangguh hanya mengikuti arahan pemerintah pusat sehingga kurang memperhatikan kearifan lokal dalam mengembangkan kampung tangguh.

Menurut Siagian (2008:142) menyatakan bahwa :

Sebagai inovator, berarti Kepala Desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan

Dengan demikian maka kepala desa belum berperan selaku innovator dalam mengatasi covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya dukungan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diambil seperti halnya pembentukan posko desa siaga covid-19 sebagai salah satu kegiatan untuk melakukan pengendalian covid-19 kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat selain itu program padat karya tunai desa sulit direalisasikan karena kurangnya kemampuan masyarakat yang akan dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga walaupun dipaksakan kepala desa memilih pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan namun hal tersebut tentunya berdampak pada ketidaktercapaian target dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu kepala desa kesulitan dalam melaksanakan program kampung tangguh karena selama ini masyarakat sulit diajak bekerjasama padahal program tersebut sangat bagus untuk mempercepat penanganan dampak covid di masyarakat serta dapat meningkatkan gotong royong masyarakat.

Selaku modernisator

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Kepala Desa selaku modernisator dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan ketiga indikator penelitian ternyata belum optimal hal ini diketahui dari Kepala Desa dalam menyediakan ruang isolasi bagi masyarakat apabila terpapar covid-19 telah menggunakan sekolah hal ini dengan mempertimbangkan anggaran untuk menyediakan ruang isolasi tidak memadai sehingga masyarakat yang menggunakan

ruang isolasi tersebut harus membawa kebutuhannya sendiri karena tidak disediakan selain itu tidak ada petugas kesehatan yang jaga untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan masyarakat yang terpapar.

Menurut Nurcholis (2011:78) menyatakan bahwa :

Dalam peranan selaku modernisator, seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang kepala desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan. Kepala desa selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan program pembangunan didesanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat.

Dengan demikian diketahui bahwa kepala desa belum berperan selaku modernisator dalam penanggulangan covid -19 di masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap covid-19 karena kurangnya menyesuaikan waktu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga ketika sosialisasi masyarakat sedang tidak ada dirumahnya. Selain itu sulitnya relawan desa atau satgas covid dalam membantu Pemerintah Desa mengatasi penyebaran virus karena memang tingginya pengaruh media sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga kurang mempercayai adanya covid-19 serta ketidakjelasan alokasi anggaran untuk penyediaan ruang isolasi sehingga Kepala Desa kesulitan dalam menentukan ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar.

Selaku pelopor

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Kepala Desa selaku pelopor dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan ketiga indikator penelitian ternyata belum optimal hal ini diketahui dari Kepala Desa dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan

penanggulangan covid-19 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya memperhitungkan habisnya barang maupun rusaknya suatu barang di tempat umum sehingga menyebabkan ketika habis atau rusak tidak ada lagi anggaran untuk menggantinya.

Menurut Siagian (2008:142) menyatakan bahwa :

Sebagai pelopor berarti Kepala Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini berarti kepeloporan Kepala Desa harus bersifat objektif akan menunjang kelancaran pembangunan. Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan

Dengan demikian maka diketahui bahwa Kepala Desa belum berperan selaku pelopor dalam kegiatan pencegahan pandemi covid-19 hal ini dikarenakan Kepala Desa kesulitan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat serta kesulitan dalam menggunakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena kegiatan tersebut kurang memberikan manfaat kepada masyarakat selain itu pemberian dukungan sarana dan prasarana covid-19 kurang rutin sehingga ketika habis atau rusak maka tidak diganti atau diperbaiki.

Selaku Pelaksana Sendiri

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Kepala Desa selaku pelaksana sendiri dalam penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan ketiga indikator penelitian ternyata belum optimal hal ini

diketahui dari Kepala Desa dalam melakukan evaluasi kurang dilakukan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya dukungan berbagai pihak kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan musyawarah desa sehingga kepala desa tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut pendapat Mustopadidjaja, (2013:59) yang menyatakan bahwa :

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dengan demikian Kepala Desa belum berperan selaku pelaksana sendiri dalam pencegahan covid-19 hal ini dikarenakan kepala desa kesulitan dalam menyusun atau merumuskan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah di Desa sehingga kepala desa kurang mendapatkan berbagai masukan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan. selain itu kepala desa kesulitan dalam menyalurkan kegiatan penanggulangan covid-19 dengan kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan mekanisme yang disampaikan pemerintah pusat kepada Kepala Desa sehingga menyebabkan Kepala Desa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan covid-19 selain itu Kepala Desa kesulitan dalam melakukan evaluasi

terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya masukan-masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan penanggulangan covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa belum berperan optimal dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sesuai dengan peran Kepala Desa menurut Siagian (2012:142). Hal ini dikarenakan kepala desa kesulitan dalam melaksanakan perannya dalam melakukan penanggulangan covid-19 di masyarakat karena kurangnya dukungan peraturan yang konsisten sehingga dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan oleh pemerintah desa, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti arahan dan sosialisasi sehingga masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan prokes. Permasalahan lainnya disebabkan oleh kurangnya dukungan yang diberikan kepada Kepala Desa baik dari satgas covid-19 maupun masyarakat dalam memberikan berbagai masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat suatu kebijakan untuk penanggulangan covid-19. Oleh Karena itu maka kepala desa telah melakukan upaya dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan covid-19 di masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kecamatan untuk dapat memahami aturan kebijakan dalam penanganan covid-19 di masyarakat, selain itu kepala desa meminta semua pihak ikut terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencegah penyebaran covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa belum berperan optimal dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten

Ciamis. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa belum berperan selaku stabilitator dalam Penanggulangan Covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama yang terjalin dalam menciptakan suasana kondusif di masyarakat serta kurangnya ketepatan sasaran dalam menciptakan stabilitas ekonomi dengan memberikan bantuan BLT DD kepada masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Penanggulangan Covid-19 karena kurangnya pemberian penjelasan oleh pemerintah desa secara rutin kepada masyarakat.
2. Kepala desa belum berperan selaku inovator dalam penanggulangan Covid-19 hal ini dikarenakan pembentukan posko penanganan Covid-19 belum menjadi prioritas dalam mengatasi permasalahan di masyarakat selain itu pengembangan program padat karya tunai desa belum dapat mencapai tujuan dari kegiatan pembangunan. Hal ini karena kurangnya ketepatan dalam penentuan masyarakat yang memperoleh program padat karya tunai desa. Begitupula halnya dengan pembentukan kampung tangguh sebagai kegiatan penanggulangan covid-19 belum memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi dampak covid-19
3. Kepala Desa belum berperan selaku modernisator dalam penanggulangan covid-19 hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait program penanggulangan covid-19 secara rutin selain itu pembentukan satuan tugas relawan Desa kurang memperhatikan kemauan dan tanggungjawab dalam menanggulangi wabah covid-19 serta kurangnya penyediaan ruang isolasi bagi masyarakat apabila terpapar covid-19.
4. Kepala Desa belum berperan selaku pelopor dalam penanggulangan covid-19, hal ini dikarenakan kepala desa kurang

memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam penanggulangan covid-19 serta keterbatasan anggaran sehingga relawan kesulitan dalam melaksanakan penanggulangan covid-19 serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh kepala desa dalam kegiatan penanggulangan covid-19.

5. Kepala Desa belum berperan selaku pelaksana sendiri dalam penanggulangan covid-19. Hal ini dikarenakan masih kurangnya melibatkan semua pihak dalam kegiatan musyawarah desa dalam membuat rencana kegiatan penanggulangan covid-19 dan kurangnya keselarasan kegiatan penanggulangan covid-19 dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat terdampak covid-19 kurang memperoleh perhatian yang layak selain itu kurangnya melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan covid-19 sehingga permasalahan yang terjadi belum dapat di atasi secara cepat.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepala desa supaya dapat berperan selaku stabilitator dalam penanggulangan Covid-19 sebaiknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait sehingga dapat menciptakan suasana kondusif di masyarakat serta menciptakan stabilitas ekonomi dengan memberikan bantuan BLT DD kepada masyarakat secara tepat sasaran dan memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Penanggulangan Covid-19.
2. Kepala Desa supaya dapat berperan selaku inovator dalam penanggulangan Covid-19 sebaiknya lebih memanfaatkan posko penanganan Covid-19 dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan covid-19 serta menetapkan prioritas dalam melaksanakan program padat karya tunai desa sehingga

penentuan masyarakat tepat sasaran. Begitupula halnya dengan pembentukan kampung tangguh sebaiknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

3. Kepala Desa supaya dapat berperan selaku modernisator dalam penanggulangan covid-19 sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin selain itu dalam pembentukan satuan tugas relawan desa sebaiknya lebih memperhatikan kemauan dan tanggungjawab dalam menanggulangi wabah covid-19 serta penyediaan ruang isolasi bagi masyarakat yang terpapar covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kepala Desa supaya dapat berperan selaku pelopor dalam penanggulangan covid-19, sebaiknya kepala desa memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam penanggulangan covid-19 secara rutin serta menyediakan anggaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan relawan dalam melaksanakan penanggulangan covid-19 serta kepala desa sebaiknya memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan penanggulangan covid-19.
5. Kepala Desa supaya dapat berperan selaku pelaksana sendiri dalam penanggulangan covid-19 sebaiknya melibatkan semua pihak dalam kegiatan musyawarah desa dalam membuat rencana kegiatan penanggulangan covid-19 dan menelaraskan kegiatan

penanggulangan covid-19 dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat terdampak covid-19 memperoleh perhatian yang layak selain itu meningkatkan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan covid-19 sehingga permasalahan yang terjadi dapat di atasi secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustopadidjaja, AR, 2013, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Peraturan presiden, keputusan menteri dan Surat Edaran Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19.
- Siagian, Sondang P. 2012, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SEMendes nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa